

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Kebijakan	24
B. Tinjauan Umum Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Jaksa.....	29
C. Tinjauan Laporan atau Pengaduan Masyarakat.....	46
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis dan Sifat Penelitian	58

B. Bahan Penelitian	63
C. Lokasi dan Subyek Penelitian.....	66
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	68
E. Jalannya Penelitian	69
F. Analisa Data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Kedudukan Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Tanggal 28 Februari 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	73
B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Tanggal 28 Februari 2018 tentang Koordinasi APIP dengan Jaksa Dalam Penanganan Laporan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	102

	C. Konsep Kebijakan yang Seharusnya Terkait Koordinasi APIP dengan Jaksa Dalam Penanganan Laporan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi.....	134
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	156
	A. Kesimpulan.....	156
	B. Saran	158
	DAFTAR PUSTAKA	161